

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan dapat disimpulkan :

1. **Adriansyah Chowijaya, Rizal Effendi, Cherrya Dhia Wenny (2015)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laba akuntansi, laba fiskal, dan arus kas operasi terhadap persistensi laba. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan yang tergabung di indeks LQ-45 periode (2009-2013) dan didapatkan sebanyak 12 perusahaan yang dijadikan sampel. Hasil dari penelitian ini laba akuntansi memiliki pengaruh signifikan terhadap persistensi laba. Namun laba fiskal dan arus kas operasi tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap persistensi laba.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Chowijaya, Effendi, dan Wenny (2015) adalah menggunakan metode *purposive sampling* dan variabel independennya menggunakan laba akuntansi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Chowijaya, Effendi, dan Wenny (2015) adalah sampel yang digunakan adalah perusahaan yang tergabung di indeks LQ-45 periode 2009-2013,

sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014.

2. Brilian Kusuma dan R. Arja Sadjiarto (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui volitalitas arus kas, volitalitas penjualan, tingkat hutang, *book tax gap*, dan tata kelola perusahaan terhadap persistensi laba. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2013. Total sampel 114 perusahaan. Analisis penelitian ini menggunakan regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa volatilitas arus kas, volatilitas penjualan, tingkat *book tax gap*, komposisi dewan komisaris, dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba, sedangkan tingkat hutang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persistensi laba.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Kusuma dan Sadjiarto (2014) adalah sampel yang digunakan yaitu menggunakan perusahaan yang bergerak pada sektor manufaktur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Kusuma dan Sadjiarto (2014) adalah periode penelitian yaitu pada 2010-2013, sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2012-2014.

3. Fitria Jumiatin dan Ni Made Dwi Ratnadi (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial dan *book tax difference* pada persistensi laba. Laporan keuangan tahunan

perusahaan manufaktur periode 2008-2011 yang terdaftar di BEI dipilih sebagai sampel. *Purposive sampling* dipilih sebagai teknik pengambilan sampel sedangkan regresi berganda digunakan sebagai alat analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif pada persistensi laba, dan sedangkan *book tax difference* dengan komponen *large positive book tax difference* dan *large negative tax difference* tidak memiliki pengaruh pada persistensi laba.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Jumiati dan Ratnadi (2014) adalah menggunakan sampel perusahaan manufaktur dan menggunakan metode *purposive sampling*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Jumiati dan Ratnadi (2014) adalah periode penelitian yaitu 2008-2011, sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2012-2014.

4. Ali Amin Kalau (2012)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh laba akuntansi, laba fiskal, arus kas operasi dan laba akrual pada persistensi laba. Variabel independen dalam penelitian ini adalah laba akuntansi, laba fiskal, arus kas operasi, dan laba akrual. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah persistensi laba. Data dari penelitian ini adalah data sekunder dari laporan keuangan perbankan yang ada di Bursa Efek Indonesia dan didapatkan 80 sampel. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laba

akuntansi, laba fiskal, arus kas operasi, dan laba akrual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persistensi laba.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Kalau (2012) adalah variabel independen menggunakan laba akuntansi dan menggunakan data sekunder. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Kalau (2012) adalah sampel yang digunakan yaitu sektor perbankan, sedangkan penelitian ini menggunakan sektor manufaktur.

5. Muhammad Khafid (2012)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap persistensi laba. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 430 perusahaan periode 2005-2010. Sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (*purposive sampling*). Melalui kriteria yang ditetapkan, terpilih sampel sebanyak 242 perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris, kepemilikan saham oleh manajerial / kepemilikan manajerial, dan komite audit terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap persistensi laba. Sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persistensi laba.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Khafid (2012) adalah populasi yang digunakan yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menggunakan variabel independen yang sama

yaitu tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Khafid (2012) adalah sampel yang digunakan adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor manufaktur saja, serta periode penelitian yaitu tahun 2005-2010 sedangkan penelitian ini pada periode 2012-2014.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara *agent* dan *principal*. Pada teori ini yang dimaksud *principal* adalah pemegang saham atau investor, sedangkan yang dimaksud *agent* adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di investor dengan pengendalian dipihak manajemen. (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Khafid, 2012) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Sedangkan (Hendriksen dan Michael, 2000 dalam Khafid, 2012) menyatakan bahwa agen menutup kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi prinsipal dan prinsipal menutup kontrak untuk memberi imbalan kepada agen.

Agency theory mengasumsikan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga sering kali menimbulkan

konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Adanya pemisahan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*) cenderung menimbulkan konflik kepentingan diantara *principal* dan *agent*. Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen kemungkinan karena agen tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan prinsipal, sehingga menimbulkan biaya agensi (*agency cost*). Adanya suatu mekanisme pengawasan, konflik antara manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*) atau yang sering disebut dengan masalah keagenan dapat diminimumkan. Mekanisme yang digunakan yaitu mekanisme *corporate governance*, yang terdiri dari komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.

2.2.2 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif merupakan teori yang memprediksi tindakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dan bagaimana manajer akan merespon kebijakan akuntansi baru yang diusulkan. Teori akuntansi positif bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi. Penjelasan yang dimaksud adalah memberikan alasan terhadap praktik akuntansi yang dilakukan. Sedangkan prediksi yang dimaksud adalah teori berusaha memprediksi fenomena yang diamati (Ghozali dan Chariri, 2007).

Penjelasan dan prediksi teori akuntansi positif berdasarkan pada proses kontrak atau hubungan keagenan antara manajer dengan kelompok lain seperti investor, kreditor, auditor, pihak pengelola pasar modal, dan institusi pemerintah. Teori akuntansi positif memiliki fokus ekonomi dan berusaha menjawab pertanyaan seperti ini (Ghozali dan Chariri, 2007):

1. Apakah biaya yang dikeluarkan untuk memilih metode akuntansi sesuai dengan manfaat yang diperoleh?
2. Apakah biaya regulasi dan proses penentuan standar akuntansi sesuai dengan manfaatnya?
3. Apakah laporan keuangan berpengaruh terhadap harga saham?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, teori akuntansi positif menggunakan asumsi sebagai berikut (Ghozali dan Chariri, 2007):

1. Manajer, investor, kreditor, dan individu lain bersikap rasional dan berusaha memaksimalkan kepuasan.
2. Manajer memiliki kebebasan untuk memilih metode akuntansi yang memaksimalkan kepuasan mereka atau mengubah kebijakan produksi, investasi dan pendanaan perusahaan untuk memaksimalkan kepuasan mereka.
3. Manajer mengambil tindakan yang memaksimalkan nilai perusahaan.

Terdapat 3 hipotesis untuk menguji teori akuntansi positif berdasarkan pertanyaan dan asumsi di atas:

1. Hipotesis rencana bonus

Manajer perusahaan lebih memilih metode yang meningkatkan laba periode berjalan dengan rencana bonus tertentu (Ghozali dan Chariri, 2007). Jika perusahaan memiliki rencana pemberian bonus maka manajer termotivasi untuk menggeser laba periode yang akan datang ke periode berjalan. Pergeseran ini dapat dilakukan dengan memilih metode tertentu yang dapat meningkatkan laba periode berjalan.

2. Hipotesis hutang / ekuitas

Makin tinggi rasio hutang / ekuitas perusahaan, makin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba (Ghozali dan Chariri, 2007). Semakin tingginya rasio hutang/ekuitas manandakan bahwa perusahaan semakin dekat dengan batas perjanjian/peraturan kredit.

3. Hipotesis biaya politik

Perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibandingkan perusahaan kecil (Ghozali dan Chariri, 2007).

2.2.3 Pengertian Laba

Masalah yang berkaitan dengan laba adalah menentukan konsep laba secara tepat untuk pelaporan keuangan sehingga angka laba merupakan angka yang bermakna bagi pemakai laporan keuangan. Pemaknaan dan pendefinisian laba mempunyai implikasi terhadap pengukuran dan penyajian laba. Laba akuntansi yang sekarang dianut dimaknai sebagai selisih antara pendapatan dan biaya karena akuntansi secara umum menganut konsep kos historis, asas akrual, dan konsep penandingan. Pendefinisian laba seperti ini lebih bermakna sebagai pengukur kembalian atas investasi (*return on investment*) daripada sekadar perubahan kas.

Para pemakai laporan keuangan mempunyai konsep laba dan model pengambilan keputusan yang berbeda – beda. Suwardjono (2010) mengatakan bahwa pengertian dan cara pengukuran laba akuntansi dengan berbagai interpretasinya diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

1. Indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi (*rate of return on invested capital*).
2. Pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen.
3. Dasar penentuan besarnya pengenaan pajak.
4. Alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara.
5. Dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik.
6. Alat pengendalian terhadap debitor dalam kontrak utang.
7. Dasar kompensasi dan pembagian bonus.
8. Alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan.
9. Dasar pembagian dividen.

Suwardjono (2010) mengatakan bahwa laba secara konseptual memiliki karakteristik umum sebagai berikut:

- a) Kenaikan kemakmuran (*wealth* atau *well-offness*) yang dimiliki atau dikuasai suatu entitas. Entitas dapat berupa perorangan atau individual, kelompok individual, institusi, badan, lembaga, atau perusahaan.
- b) Perubahan terjadi dalam suatu kurun waktu (periode) sehingga harus diidentifikasi kemakmuran awal dan kemakmuran akhir.
- c) Perubahan dapat dinikmati, didistribusi, atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran asalkan kemakmuran awal dipertahankan.

2.2.4 Perubahan Laba

Tujuan utama suatu perusahaan adalah memaksimalkan laba. Perubahan laba merupakan peningkatan dan penurunan laba yang diperoleh perusahaan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kinerja manajer suatu perusahaan dapat diukur dan dievaluasi berdasarkan laba yang diperoleh. Kebijakan manajemen baik jangka panjang maupun jangka pendek akan tercermin dalam laba. Laba merupakan signal kebijakan manajemen baik yang berdampak negatif maupun positif (Suwardjono, 2010).

Kenaikan laba yang dilaporkan oleh manajemen disebabkan oleh pilihan metode akuntansi dalam proses akrual akan menyebabkan adanya perbedaan besar antara laba akuntansi dan laba fiskal. Jika *book tax differences* besar yang merupakan bukti kenaikan (penurunan) laba karena pilihan akrual, maka komponen akrual tersebut akan menunjukkan pembalikan yang besar secara rata – rata di masa depan (Wijayanti, 2006 dalam Rosanti, 2013). Manajer memanfaatkan keleluasaan peraturan *generally accepted accounting principles* (GAAP) atau di Indonesia dikenal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk meningkatkan laba akuntansi tanpa menyebabkan peningkatan pada laba fiskal.

Hanafi dan Halim (1995) menyatakan bahwa pertumbuhan labadipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Besarnya perusahaan, semakin besar perusahaan, maka ketetapan pertumbuhan laba yang diharapkan semakin tinggi.
2. Umur perusahaan, perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki pengalaman dalam meningkatkan laba, sehingga ketetapannya masih rendah

3. Tingkat leverage, bila perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka manajer cenderung memanipulasi laba sehingga dapat mengurangi ketetapan pertumbuhan laba.
4. Tingkat penjualan, tingkat penjualan dimasa lalu yang tinggi, maka semakin tinggi tingkat penjualan dimasa yang akan datang sehingga pertumbuhan laba semakin tinggi.
5. Perubahan laba masa lalu, semakin besar pertumbuhan laba masa lalu, semakin tidak pasti laba yang akan diperoleh dimasa mendatang

2.2.5 Persistensi Laba

Persistensi laba merupakan laba yang menunjukkan keberlanjutan laba dimasa yang akan datang yang ditentukan oleh komponen akrual dan arus kas (Penman, 2001). Selain dipengaruhi oleh komponen akrual dan arus kas, faktor lain yang dapat mempengaruhi persistensi laba adalah :

1. *Book Tax Difference*, mempengaruhi penilaian investor untuk memprediksi laba yang akan datang. Perusahaan yang memiliki *Large Positive Book-Tax Difference* (Laba akuntansi lebih besar dibanding laba fiskal) menunjukkan bahwa investor menginterpretasikan informasi ini sebagai sinyal mengenai kualitas laba saat ini. Investor membenarkan masih adanya komponen akrual bagi perusahaan. Tetapi investor cenderung *underestimate* terhadap persistensi arus kas. Untuk perusahaan yang mengalami *Small Book-Tax Difference* dan *Large Negative Book-Tax Differencen* (Laba akuntansi lebih kecil dibanding laba fiskal) yang besar, investor cenderung *overestimate* komponen

akrual laba. Secara keseluruhan tampak bahwa *Book-Tax Difference* mempengaruhi persepsi investor menilai persistensi laba (Hanlon, 2005 dalam Andriansyah, 2015).

2. Sumber *regulatory* dan *opportunistic* memiliki peran terhadap persistensi laba. Hal tersebut menjadi hal terpenting bagi investor maupun para peneliti ketika mengintreprestasikan besarnya *Large Book-Tax Difference* dianggap memiliki kualitas laba yang rendah, yang disebabkan oleh pelaku oportunistik manajemen. Perusahaan yang mengalami *Abnormal Book-Tax Difference* (Perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal yang disebabkan oleh kebijakan diskresi akrual) dinilai kurang persisten dibanding dengan perusahaan yang memiliki *Normal Book-Tax Difference* (Perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal yang disebabkan oleh aturan baik standar akuntansi keuangan maupun aturan perpajakan).

Persistensi laba merupakan kemampuan laba suatu perusahaan untuk bertahan di masa mendatang (Penman,2001). Dimana penghitungannya didasarkan pada rumus sebagai berikut:

$$E_{it} = \beta_0 + \beta_1 E_{it-1} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

E_{it} = laba akuntansi (*earning*) setelah pajak perusahaan I pada tahun t

E_{it-1} = laba akuntansi (*earning*) setelah pajak perusahaan I pada tahun sebelum t

β_0 = konstanta

β_1 = persistensi laba akuntansi

ϵ_{it} = laba akuntansi (*earning*) setelah pajak perusahaan I pada tahun t

Apabila persistensi laba akuntansi $\beta_1 > 1$ hal ini menunjukkan bahwa laba adalah *high* persisten. Apabila persistensi laba akuntansi $\beta_1 > 0$ hal ini menunjukkan bahwa laba perusahaan persisten. Sebaliknya Apabila persistensi laba akuntansi $\beta_1 \leq 0$ berarti laba perusahaan fluktuatif dan tidak persisten.

2.2.6 Laba Akuntansi

Teori akuntansi (Anis dan Imam, 2001:300) menyatakan laba sebagai pengukur kenaikan aktiva yang tergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. Konsep dasar dan penyajian laporan keuangan (IAI, 2012) mengartikan laba adalah kenaikan manfaat selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan keajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi distribusi modal. Laba akuntansi secara optimal didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi periode tertentu diharapkan pada biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu. Laba akuntansi memiliki lima karakteristik menurut (Anis dan Imam, 2001:302) yaitu :

1. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual (*accrual basis*) terutama yang berasal dari penjualan barang dan jasa
2. Laba akuntansi didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu.
3. Laba akuntansi mengacu pada kinerja perusahaan selama satu periode tertentu serta didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan

pemahaman khusus tentang definisi pengukuran dan pengakuan pendapatan.

4. Laba akuntansi memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk *cost historis*.
5. Dalam laba akuntansi diperlukan juga konsep penandingan (*matching*) antara pendapatan dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.

Laba bersih menurut (Mamduh dan Abdul, 2003:16) merupakan selisih antara total pendapatan dikurangi dengan total biaya, dengan kata lain laba bersih adalah selisih laba operasional dikurangi dengan biaya bunga dan pajak penghasilan (PPH). Dengan demikian laba bersih adalah laba yang akan dibagikan sebagian dalam bentuk deviden dan sisanya merupakan laba ditahan bagi perusahaan yang bersangkutan.

2.2.7 Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance didefinisikan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai upaya motivasi manajemen untuk meningkatkan keberhasilan (*effectiveness*) dan sekaligus juga mengendalikan perilaku manajemen agar tetap mengindahkan kepentingan stakeholders, dalam kerangka yang sudah disepakati bersama. *Good corporate governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang mereka investasikan. *Good corporate governance* berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi

investor, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri dan menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau kapital yang telah ditanamkan oleh investor dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengendalikan para manajer (El Gammal dan Showeiry, 2012).

Konsep *return theory* adalah hubungan atau kontak antara *principal* dan *agent*. *Principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai *principal*, dan CEO (*Chief Executive Officer*) sebagai *agent* mereka. Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara manajer dan pemegang saham.

Bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri. Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing menginginkan tujuan mereka terpenuhi. Akibat yang terjadi adalah munculnya konflik kepentingan. Pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih besar atas investasi yang mereka tanamkan sedangkan manajer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan.

Kondisi perusahaan yang dilaporkan oleh manajer tidak sesuai atau tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan perbedaan informasi yang dimiliki antara manajer dengan pemegang saham. Sebagai pengelola, manajer lebih mengetahui keadaan yang ada dalam perusahaan daripada pemegang saham. Keadaan tersebut dikenal sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan *earnings management*.

Bukit dan Takiah (2009) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dilihat bahwa konflik agensi yang sering terjadi antara manajer dengan pemegang saham dipicu adanya sifat dasar tersebut (Bukit dan Takiah, 2009). Manajer dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dengan perilaku oportunistik dari manajer, manajer bertindak untuk mencapai kepentingan mereka sendiri, padahal sebagai manajer seharusnya memihak kepada kepentingan pemegang saham karena mereka adalah pihak yang memberi kuasa manajer untuk menjalankan perusahaan.

1. Komite Audit

Nasution dan Setiawan (2007) menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan

dan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangatlah penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit juga dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

Pengukuran komite audit dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan proporsi komite audit, yaitu perbandingan jumlah komite audit dengan jumlah dewan komisaris seperti yang dilakukan Sulistya (2013), rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Proporsi Komite Audit} = \frac{\text{Total Komite Audit}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

2. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terfiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali serta pemegang saham bebas dari hubungan bisnis lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Gusti, 2011).

Permasalahan dalam penerapan *corporate governance* adalah adanya CEO yang memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan dengan dewan komisaris. Efektivitas dewan komisaris dalam menyeimbangkan kekuatan CEO sangat dipengaruhi oleh tingkat independensi dari dewan komisaris. Konteks independensi ini menjadi semakin kompleks dalam perusahaan yang sedang

mengalami kesulitan keuangan. Dengan semakin meningkatnya tekanan dari lingkungan perusahaan, maka kebutuhan dari luar akan semakin meningkat.

Proporsi dewan komisaris independen dapat dihitung dengan cara menghitung presentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan terhadap seluruh ukuran dewan komisaris perusahaan sampel (Ujiyanto, 2007). Komisaris independen diukur dengan:

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{jumlah dewan komisaris independen}}{\text{total anggota dewan komisaris}}$$

3. Dewan Direksi

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengemukakan dewan direksi adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolegia. Dewan direksi merupakan anggota perusahaan yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab penuh atas pengelolaan sebuah perusahaan untuk kepentingan perusahaan agar sesuai dengan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik didalam maupun diluar perusahaan. Dewan direksi juga bertanggung jawab terhadap manajemen dan kinerja perusahaan. Semakin sering rapat antara anggota dewan direksi, maka hal ini dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar anggota, sehingga lebih mudah untuk mewujudkan *good corporate governance*. Dalam penelitian ini dewan direksi diukur dengan menggunakan jumlah dewan direksi. :

$$\text{Proporsi Dewan Direksi} = \frac{\text{jumlah dewan direksi}}{\text{jumlah dewan perusahaan}}$$

2.2.8 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan dapat diklasifikasikan menjadi blok kepemilikan eksternal (*external block ownership*) dan blok kepemilikan internal (*insider block ownership*) atau kepemilikan manajerial (*managerial block ownership*). Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan mengimplikasikan adanya pengorbanan dalam penggunaan sumber daya secara efisien untuk memaksimalkan *profit* yang diperoleh, di mana kepemilikan yang tersebar akan mengurangi insentif bagi manajer untuk memaksimalkan *profit*. Dalam penelitian terbaru, struktur kepemilikan dihubungkan dengan kerangka legal. Pada negara yang perlindungan terhadap investornya lemah, pemusatan kepemilikan menjadi pengganti dari perlindungan legal. Dengan demikian, pemegang saham mayoritas dapat mengharapkan untuk memperoleh pengembalian investasi mereka.

Pemusatan kepemilikan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan tersebut dengan meminimumkan *agency cost* (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Andriansyah, 2015). Namun, pemusatan kepemilikan tersebut juga mengandung biaya potensial. Bukti empiris pada negara berkembang menunjukkan bahwa pemusatan kepemilikan, khususnya keluarga yang juga mengendalikan perusahaan, kemungkinan dapat menimbulkan mudahnya perilaku meminjam, sehingga akan meningkatkan tingkat hutang perusahaan.

Jika dihubungkan dengan keadaan di Indonesia sebagai negara berkembang, peningkatan penggunaan hutang dalam suatu perusahaan berhubungan dengan beberapa ciri khas dari perekonomian yang berada dalam tahap transisi, antara lain perlindungan legal yang lemah terhadap kepentingan pemegang saham

minoritas, penegakan hukum yang lemah, dan pemusatan kepemilikan. Penggunaan hutang yang meningkat ini akan menyebabkan penurunan kinerja perusahaan.

1. Kepemilikan Manajerial

(Jensen dan Meckling, 1976 dalam Khafid, 2012) mengungkapkan bahwa struktur kepemilikan ekuitas berpengaruh penting terhadap insentif manajerial dan nilai perusahaan. Mereka berargumen bahwa kepemilikan saham manajerial dapat mengurangi insentif manajer untuk mengkonsumsi kemewahan, menyedot kekayaan pemegang saham, atau terlibat dalam perilaku yang tidak memaksimalkan nilai lainnya. Argumen ini dikenal sebagai hipotesis penyatuan kepentingan (*convergence of interests hypothesis*).

Hipotesis *managerial self-interest* atau hipotesis *managerial entrenchment* mengungkapkan bahwa apabila dihadapkan pada kesempatan, manajer yang tidak menyukai risiko akan lebih berinsentif untuk merendahkan risiko kehilangan pekerjaan yang tidak dapat didiversifikasi dengan memastikan kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini dikarenakan mereka menanggung beban risiko yang tidak dapat dihindarkan atas kekayaan perusahaan yang mempekerjakan mereka.

Namun, apabila manajer pada awalnya telah memiliki porsi yang signifikan atas ekuitas perusahaan, peningkatan dalam kepemilikan saham manajerial dapat mengarah pada penguatan posisi manajer dan penurunan tingkat hutang (McConnel dan Servaes, 1995). Penurunan tingkat hutang ini dikarenakan manajer yang posisinya kuat dalam perusahaan akan mempertimbangkan dengan

hati-hati pilihan tingkat hutang perusahaan. Manajer dapat lebih menyukai tingkat hutang yang lebih rendah dari seharusnya dikarenakan keinginan mereka mengurangi risiko perusahaan untuk melindungi modal sumber daya mereka, atau ketidaksukaan mereka terhadap tekanan kinerja yang timbul akibat komitmen penggunaan uang tunai dalam jumlah yang besar. McConnel dan Servaes (1995) menemukan hubungan yang non-linear antara kepemilikan manajerial dengan kinerja perusahaan.

Kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki manajemen dari seluruh jumlah saham perusahaan yang dikelola (Boediono, 2005). Rumus menghitung kepemilikan manajerial:

$$\text{Proporsi Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki manajemen/direktur}}{\text{total saham yang beredar}} \times 100\%$$

2. Kepemilikan Institusional

(Slovin dan Sushka, 1993 dalam Khafid, 2012), menunjukkan bahwa nilai perusahaan dapat meningkat jika institusi mampu menjadi alat monitoring yang efektif. Investor institusi dapat dibedakan menjadi dua yaitu investor pasif dan aktif. Investor aktif tidak terlalu ingin terlibat dengan keputusan manajemen. Sebaliknya dengan investor aktif terlibat dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Keberadaan investor institusi ini dipandang mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan. Tak jarang kegiatan investor ini mampu meningkatkan harga saham sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan.

Aktifitas monitoring institusi mampu mengubah struktur pengelolaan perusahaan dan mampu meningkatkan kemakmuran pemegang saham. (Cruthley *et al*, 1999 dalam Khafid, 2012) yang menemukan bahwa monitoring yang dilakukan institusi mampu menstabilitaskan biaya keagenan lain (hutang, deviden dan kepemilikan manajerial) sehingga biaya keagenan menurun dan nilai perusahaan meningkat. Kepemilikan oleh bank akan menurunkan kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan. Namun, apabila struktur kepemilikan perusahaan dimiliki oleh dewan direksi atau dewan komisarisnya maka dewan tersebut justru akan cenderung melakukan tindakan-tindakan eksplorasi yang menguntungkan secara pribadi. Oleh karena itu kepemilikan perusahaan oleh dewan direksi semakin meningkat maka keputusan yang diambil oleh direksi akan lebih cenderung untuk menguntungkan dirinya dan secara keseluruhan akan merugikan perusahaan sehingga kemungkinan nilai perusahaan akan cenderung mengalami penurunan.

Pada kasus Indonesia, kepemilikan institusi cukup mampu menjadi alat monitoring yang baik. Hal ini dikarenakan pemegang saham institusi telah memiliki kemampuan dan sarana yang memadai untuk monitor perusahaan dimana sahamnya mereka miliki.

Kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki pihak institusional dari seluruh jumlah

$$\text{Proporsi Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki oleh institusi}}{\text{total saham yang beredar}} \times 100\%$$

saham perusahaan (Boediono, 2005). Rumus untuk menghitung kepemilikan institusional adalah :

2.2.9 Pengaruh Laba Akuntansi Terhadap Persistensi Laba

Teori akuntansi (Anis dan Imam, 2001:300) menyatakan laba sebagai pengukur kenaikan aktiva yang tergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. Konsep dasar dan penyajian laporan keuangan (IAI, 2012) mengartikan laba adalah kenaikan manfaat selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan keajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi distribusi modal. Laba akuntansi secara optimal didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi periode tertentu diharapkan pada biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu. Laba akuntansi memiliki lima karakteristik menurut (Anis dan Imam, 2001:302) yaitu :

1. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual (*accrual basis*) terutama yang berasal dari penjualan barang dan jasa
2. Laba akuntansi didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu.
3. Laba akuntansi mengacu pada kinerja perusahaan selama satu periode tertentu serta didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi pengukuran dan pengakuan pendapatan.
4. Laba akuntansi memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk *cost historis*.

5. Dalam laba akuntansi diperlukan juga konsep penandingan (*matching*) antara pendapatan dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.

Laba bersih menurut (Mamduh dan Abdul, 2003:16) merupakan selisih antara total pendapatan dikurangi dengan total biaya, dengan kata lain laba bersih adalah selisih laba operasional dikurangi dengan biaya bunga dan pajak penghasilan (PPH). Dengan demikian laba bersih adalah laba yang akan dibagikan sebagian dalam bentuk deviden dan sisanya merupakan laba ditahan bagi perusahaan yang bersangkutan.

Tujuan utama suatu perusahaan adalah memaksimalkan laba. Perubahan laba merupakan peningkatan dan penurunan laba yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kinerja manajer suatu perusahaan dapat diukur dan dievaluasi berdasarkan laba yang diperoleh. Kebijakan manajemen baik jangka panjang maupun jangka pendek akan tercermin dalam laba. Laba merupakan signal kebijakan manajemen baik yang berdampak negatif maupun positif (Suwardjono, 2010).

Persistensi laba adalah properti laba yang menjelaskan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan laba yang diperoleh saat ini sampai masa mendatang. Persistensi laba sering digunakan sebagai pertimbangan kualitas laba karena persistensi laba merupakan komponen dari karakteristik kualitatif relevansi yaitu *predictive value*. Penman (2001) menyatakan bahwa persistensi laba adalah laba akuntansi yang diharapkan di masa mendatang (*expected future earning*) yang tercermin pada laba tahun berjalan (*current earning*). Andriansyah, 2015

menyatakan laba akuntansi memiliki pengaruh signifikan terhadap persistensi laba.

Manajer akan berusaha menunjukkan bahwa mereka mampu meningkatkan laba perusahaan, karena kinerja manajer suatu perusahaan dapat diukur dan dievaluasi berdasarkan laba yang diperoleh. Kebijakan manajemen baik jangka panjang maupun jangka pendek akan tercermin dalam laba. Laba merupakan signal kebijakan manajemen baik yang berdampak negatif maupun positif. Meningkatnya laba dari tahun ke tahun diharapkan mampu meningkatkan persistensi laba.

2.2.10 Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Persistensi Laba

Good Corporate Governance didefinisikan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai upaya motivasi manajemen untuk meningkatkan keberhasilan (effectiveness) dan sekaligus juga mengendalikan perilaku manajemen agar tetap mengindahkan kepentingan stakeholders, dalam kerangka yang sudah disepakati bersama. Khafid (2012) mengungkapkan bahwa *corporate governance* secara signifikan berpengaruh terhadap persistensi laba. Oleh karena itu, semakin baik *corporate governance*, maka kualitas perusahaan tersebut akan meningkat seiring dengan tingginya persistensi laba.

Persistensi laba dapat ditingkatkan dengan *good corporate governance* (tata kelola yang baik). Semakin besar pengawasan terhadap perusahaan, maka manajer (*agent*) akan semakin bertanggungjawab dalam melaksanakan perintah dari pemegang saham (*principal*). Pengawasan yang dilakukan melalui mekanisme

dari *good corporate governance* terdiri dari komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi.

Komisaris independen merupakan suatu mekanisme yang bertugas untuk mengawasi dan memberi petunjuk kepada manajemen perusahaan. KNKG (2006), menyatakan bahwa komisaris independen akan meningkatkan kualitas pengawasan dalam sebuah perusahaan. Semakin besar proporsi komisaris independen, maka akan menunjukkan pengawasan yang lebih baik. Sehingga dengan peran komisaris independen dalam menjalankan fungsi pengawasannya, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menghasilkan laba yang tinggi, sehingga seiring dengan tingginya laba maka, persistensi laba akan semakin tinggi. Khafid (2012) dan Briliana (2014) menyatakan *Good Corporate Governance* dengan indikator komite audit, dewan direksi, dan komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persistensi laba.

Komite audit dapat melakukan sinergi dengan audit internal untuk meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan. Apabila terdapat dugaan penyimpangan (*fraud*) di perusahaan yang melibatkan direksi perusahaan, maka komisaris dapat menugaskan komite audit untuk melakukan audit (Efendi, 2009). Sedangkan, dewan direksi akan bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola perusahaan. Anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan. Komposisi direksi harus melakukan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, dan cepat serta bertindak independen. Dewan direksi akan

bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan laba yang memastikan persistensi laba.

2.2.11 Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Persistensi Laba

Struktur kepemilikan dapat diklasifikasikan menjadi blok kepemilikan eksternal (*external block ownership*) dan blok kepemilikan internal (*insider block ownership*) atau kepemilikan manajerial (*managerial block ownership*). Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan mengimplikasikan adanya pengorbanan dalam penggunaan sumber daya secara efisien untuk memaksimalkan *profit* yang diperoleh, di mana kepemilikan yang tersebar akan mengurangi insentif bagi manajer untuk memaksimalkan *profit*. Dalam penelitian terbaru, struktur kepemilikan dihubungkan dengan kerangka legal. Pada negara yang perlindungan terhadap investornya lemah, pemusatan kepemilikan menjadi pengganti dari perlindungan legal. Dengan demikian, pemegang saham mayoritas dapat mengharapkan untuk memperoleh pengembalian investasi mereka.

Khafid (2012) menyatakan struktur kepemilikan dengan indikator kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persistensi laba, sedangkan dengan indikator kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap persistensi laba. Penelitian yang dilakukan Khafid (2012) menjelaskan bahwa, struktur Kepemilikan diklasifikasikan menjadi dua yaitu, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Kepemilikan saham manajerial dapat mengurangi insentif manajer untuk mengkonsumsi kemewahan, menyedot kekayaan pemegang saham, atau terlibat dalam perilaku yang tidak

memaksimalkan nilai lainnya. Nilai perusahaan dapat meningkat jika kepemilikan institusional mampu menjadi alat monitoring yang efektif.

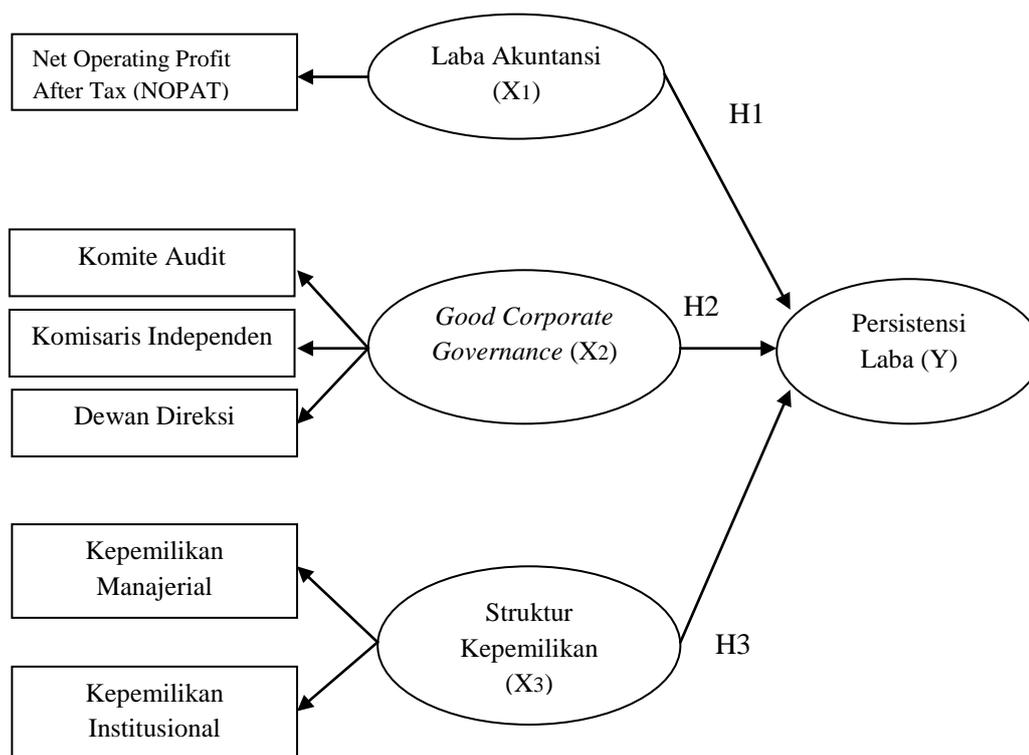
Kepemilikan mengarah pada kekuasaan untuk melakukan kontrol dalam suatu perusahaan dengan menetapkan kebijakan dan tindakan pada perusahaan. Sugiarto (2009), menyatakan bahwa pengaruh struktur kepemilikan dan *corporate control* terhadap struktur modal akan menjadi perhatian khusus dengan pertimbangan dalam sistem ekonomi modern. Banyak perusahaan yang tidak dikelola oleh pemiliknya, melainkan dikelola oleh manajer profesional yang diberi kompensasi untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan pemilik. Hal tersebut akan memungkinkan untuk mengakibatkan adanya permasalahan keagenan (*agency problem*) maupun asimetri informasi.

Kepemilikan manajerial menjadi berpengaruh pada perusahaan karena manajer bukan hanya berperan sebagai manajer melainkan juga sebagai pemegang saham. Ini akan menjadikan manajer akan lebih giat untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham. Kepemilikan manajerial dapat digunakan untuk menentukan kualitas laba mendatang yang tercermin dari persistensi labanya, semakin pihak manajemen memiliki saham perusahaan berarti semakin besar rasa tanggung jawab manajer untuk mempertanggung jawabkan laporan keuangan.

Kepemilikan institusional sebagai bagian dari struktur kepemilikan dapat memiliki peranan yang lebih dekat untuk memantau kegiatan perusahaan. Investor institusional (*principal*) memiliki kesempatan, sumber daya dan kemampuan untuk memonitor serta mempengaruhi manajer perusahaan, sehingga manajer

(*agent*) akan lebih giat dalam meningkatkan laba perusahaan yang akan berdampak pada persistensi laba.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pemikiran dengan menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) di atas terdiri dari dua variabel laten atau konstruk yaitu dependen dan independen. Laba akuntansi, *Good Corporate Governance*, dan Struktur Kepemilikan sebagai konstruk independen dan persistensi laba sebagai konstruk dependen. Kedua konstruk tersebut dilambangkan dengan symbol lingkaran oval karena merupakan variabel yang tidak biasa diukur secara langsung.

Konstruk Laba akuntansi, *Good Corporate Governance*, dan struktur kepemilikan adalah konstruk dengan indikator refleksif yaitu konstruk yang

direfleksikan dan dijelaskan oleh indikator-indikatornya di mana arah panah hubungan kausalitas berasal dari konstruk menuju ke indikator. Indikator dari *Good Corporate Governance* adalah indikator komite audit, komisaris independen, dan dewan direksi. Sedangkan indikator dari struktur kepemilikan adalah indikator kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Semua indikator pada kerangka pikir ini disimbolkan dengan bentuk kotak karena merupakan variabel yang bisa diukur. Sehingga sesuai dengan kerangka pikir tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh laba akuntansi, *Good Corporate Governance*, dan struktur kepemilikan terhadap persistensi laba.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka hipotesis penelitian ini adalah:

- H1 : Laba akuntansi berpengaruh terhadap persistensi laba.
- H2 : *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap persistensi laba.
- H3 : Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap persistensi laba.